

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Fardiana Ichalina
fardianaichaa@yahoo.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of financial statement presentation and its accessibility on local financial management accountability. While, the population was East Java Local Organization. The research was causal-comparative with quantitative approach. Moreover, the sampling technique used survey. Furthermore, the data were primary, in which the questionnaires were distributed to respondents. Besides, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 68 respondents as sample. In addition, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 23.0. The research result, simultaneously, concluded financial statement presentation and its accessibility had effected the local financial management accountability. Furthermore, in partially, financial statement presentation had positive and significant effect on the local financial management accountability and financial statement accessibility had positive and significant effect on the local financial management accountability. In brief, the result had supported all of these hypotheses which were formulated within the research.

Keywords: financial statement presentation, financial statement accessibility, accountability of local financial statement management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 68 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun dengan adanya wewenang tersebut, bukan berarti pemerintah daerah dapat

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan individu tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) memperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2009) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan Fauziyah (2017) memperoleh hasil bahwa Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa

penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? (2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?. Dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kontribusi praktis dalam penelitian ini yaitu, diharapkan mampu menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta memberikan informasi atau gambaran bagi aparat pemerintahan khususnya dalam meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. (2) Kontribusi Teoretis dalam penelitian ini yaitu, dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan tentang penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Mardiasmo (2002) menyatakan, adanya tuntutan

yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 menyatakan penyajian laporan keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) selaku lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor (pemeriksa), lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah pusat/daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Rohman (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Senada dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2009:20) menyatakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2009:20). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:21).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Halim (2006) menyatakan masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) dan Sande (2013) menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

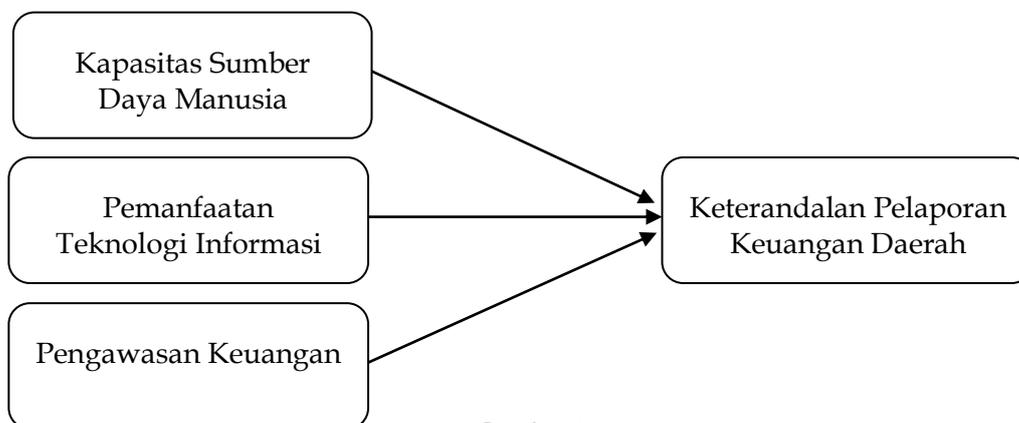
Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari pengertian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahida (2015) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:11). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Jawa Timur, jumlah OPD Provinsi Jawa Timur adalah 59 OPD yang terdiri dari 13 Sekretariat Daerah, Sekertariat DPRD, 24 Dinas, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, 7 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, 5 RSUD, 5 BAPERWIL, Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 Lembaga Lain. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang

diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Fauziyah tahun 2017. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan daerah: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan suatu daerah. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Fauziyah tahun 2017. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah: (1) Keterbukaan; (2) Kemudahan; (3) *Accesible*.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner milik Fauziyah tahun 2017. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum; (2) Akuntabilitas proses; (3) Akuntabilitas program; (4) Akuntabilitas kebijakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu instrumen atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$APK = \alpha + \beta_1 PLK + \beta_2 ALK + \varepsilon$$

Dimana :

APK : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α : Konstanta

PLK : Penyajian Laporan Keuangan

ALK : Aksesibilitas Laporan Keuangan

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

ε : *Error*

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya terdistribusi (sebarannya) normal atau tidak normal Ghazali (2005: 147). Data dikatakan baik apabila mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2005: 41). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi tidak memiliki varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *studentized residual (SRESID)* dan *standardized predicted value (ZPRED)* , dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Modal (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F >$

0,05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas dapat dilihat jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 68-2 = 66$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka r_{tabel} untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,2387. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	PLK1	0,700	0,2387	Valid
	PLK2	0,752	0,2387	Valid
	PLK3	0,739	0,2387	Valid
	PLK4	0,567	0,2387	Valid
	PLK5	0,625	0,2387	Valid
	PLK6	0,617	0,2387	Valid
	PLK7	0,729	0,2387	Valid
	PLK8	0,725	0,2387	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	ALK1	0,800	0,2387	Valid
	ALK2	0,706	0,2387	Valid
	ALK3	0,742	0,2387	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	APK1	0,640	0,2387	Valid
	APK2	0,506	0,2387	Valid
	APK3	0,520	0,2387	Valid
	APK4	0,679	0,2387	Valid
	APK 5	0,597	0,2387	Valid
	APK6	0,620	0,2387	Valid
	APK7	0,592	0,2387	Valid
	APK8	0,600	0,2387	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2387$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i> (α)	Koefisien <i>alpha</i>	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0,734	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,609	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,834	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu penyajian laporan keuangan sebesar 0,734, aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,609 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,834. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah provinsi jawa timur. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.403	3.602		4.276	.000
PLK	.387	.097		3.980	.000
ALK	.505	.176		2.860	.006

a. Dependent Variable: APK

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

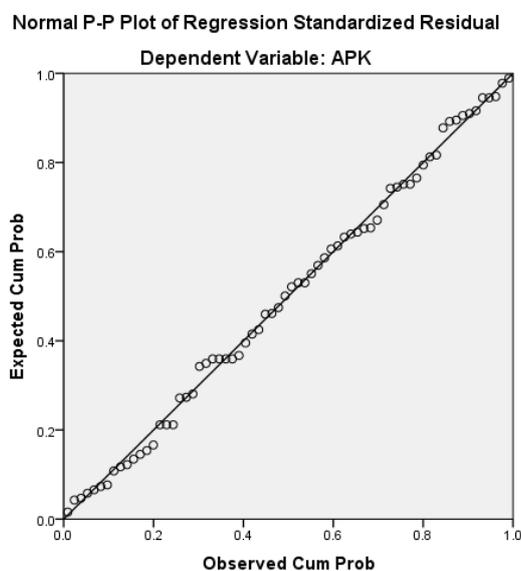
$$APK = 15,403 + 0,387PLK + 0,505ALK + e$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: (1) Nilai koefisien PLK sebesar 0,387, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel PLK dengan variabel APK. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika penyajian laporan keuangan semakin baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika penyajian laporan keuangan semakin buruk, maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Nilai koefisien ALK sebesar 0,505, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel ALK dengan variabel APK. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan semakin baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika aksesibilitas laporan keuangan semakin buruk, maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. antara variabel PK dengan variabel KP. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika pengawasan keuangan semakin baik, maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya jika pengawasan keuangan semakin buruk, maka akan menurunkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Sumber: Data Primer diolah, 2019

Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PLK	,963	1,039
ALK	,963	1,039

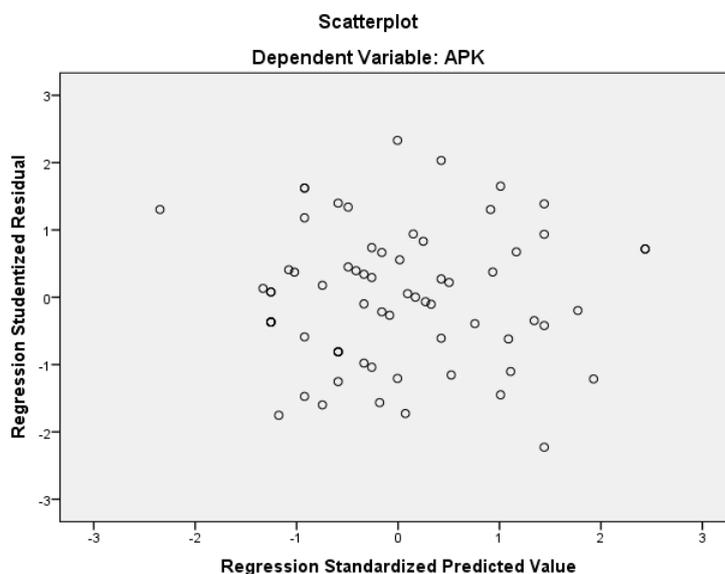
a. Dependent Variable: APK

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini:



Sumber: Data Primer diolah, 2019

Gambar 3
Gambar Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikan $> 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (2) Jika tingkat signifikan $< 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	155,334	2	77,667	14,766	,000 ^b
1 Residual	341,901	65	5,260		
Total	497,235	67			

a. Dependent Variable: APK

b. Predictors: (Constant), ALK, PLK

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 14,766 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,559 ^a	,312	,291	2,293

a. Predictors: (Constant), ALK, PLK

b. Dependent Variable: AKI

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,291 atau 29,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah

sebesar 29,10% sedangkan sisanya 70,90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hal tersebut mengidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	15.403	3.602		4.276	.000
PLK	.387	.097		3.980	.000
ALK	.505	.176		2.860	.006

a. Dependent Variable: APK

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima; (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 7 hasil penelitian menemukan bahwa penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) dan Sande (2013), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penyajian laporan keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah harus menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel 7 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015) yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun *investor*) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan model diketahui bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan model layak digunakan dalam penelitian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Pengujian pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (3) Pengujian pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,006 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Waktu yang terbatas untuk responden mengisi kuesioner. Semakin lama waktu yang diberikan maka hasil yang didapat lebih valid; (2) Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; (3) Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, disarankan untuk melakukan peningkatan

dalam hal yang pertama penyajian laporan keuangan yang lebih baik lagi, dapat di pahami dengan mudah oleh pengguna yang membutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah; (2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah misalnya sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi dan audit internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Donaldson, L., dan J. H. Davis. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management* 16: 49-64.
- Fauziyah, M. R. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Andi. Yogyakarta.
- Nordian, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Rohman, A. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 9 No. 1.
- Safitri, R. A. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sande, P. 2013. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Universitas Hasannudin. Makassar.